

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJAKEUANGAN

PEMERINTAH KOTA PALOPO

Nadila¹

A.Dahri Adi Patra LS,S.E.,M.Si²

Nispa Sari,S.E.,M.AK³

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,

Universitas Muhammadiyah Palopo

Email : nadilaaurelya8@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was determine the Impact of the Covid-19 Pandemic on Regional Financial Performance in Southeast Minahasa Regency. The method used in this research was descriptive quantitative method using a secondary data analysis approach with a nonparametric test instrument using the Wilcoxon Test. Based on the research results, the impact of the COVID-19 pandemic caused a decline in the financial performance of Southeast Minahasa Regency during the Covid-19 pandemic compared to the previous year's performance, but the impact was not significant.

Keywords: Covid 19 pandemic, performance, regional finances

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palopo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah Kota Palopo di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan.

Kata Kunci: Pandemi covid 19, Kinerja, Keuangan daerah

PENDAHULUAN

Mewabahnya pandemi Covid-19 disemua Negara memberikan akibat yang sangat besar untuk perekonomian global pada seluruh zona, salah satunya penyusutan serta perlambatan zona perekonomian Indonesia yang saat ini sangat dicermati oleh pemerintah. Dalam keadaan pandemi Covid-19 sangat berakibat pada perekonomian Indonesia sebab terdapatnya penyusutan penjualan, modal, kesusahan bahan baku serta distribusi yang terhambat sebab terdapatnya Pembatasan Skala Besar (PSBB) yang terjalin pada banyak wilayah di Indonesia (Siswati, 2021)

Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 banyak perubahan yang terjadi mengalami banyak perubahan. APBN memiliki dampak sangat luas baik dalam melanjutkan penanganan dibidang kesehatan karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan Covid-19, serta terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dalam pos pendapatan dan belanja yang upaya pemulihan ekonomi domestik dimasa pandemi Covid-19. Melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional dimasa pandemi sekarang

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk

mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan (Natasha, 2013)

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan dimasa pandemi Covid-19 sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya (Mahsun, 2017).

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dan Kabo (1998) dalam (Saftiana, Y., & Susantih, 2019), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan

fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini disusun berdasarkan asas perimbangan incremental budget dimana masing-masing komponen pendapatan dan belanja besarnya dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu dan mengabaikan rasio keuangan dalam APBD.

TUJUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan

keagenan di dalam teori keagenan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi agent adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi principal adalah masyarakat. Masyarakat sebagai principal mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak

lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama diajukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keluaran/hasil dari aktivitas/program yang hendak ataupun sudah dicapai sehubungan dengan pemakaian anggaran daerah dengan kuantitas serta mutu yang terukur, keahlian daerah bisa diukur dengan memperhitungkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada penduduk (Natasha, 2013)

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

Bastian Indra, (2005) dalam *Performance Measurement Guide* menyatakan bahwa: "Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses".

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini dihitung dengan cara pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer.

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$
 yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan}}{\text{Pendapatan Realisasi}}$$
 yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD Realisasi Penerimaan PAD

Dampak Pandemi Covid-19

Dampak Covid-19 berdampak terhadap sektor ekonomi nasional yang mana berdampak pada proses pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan belanja pemerintah. Bagi ekonomi nasional tekanan yang didapat dari pandemik Covid-19 ini adalah dalam bentuk ancaman resesi dan krisis ekonomi. Selama masa pandemi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh hanya

sekitar 2.3%, dan skenario terburuknya yaitu mencapai -0.4%. Tindakan atau solusi yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan dilakukannya realokasi dan refocusing anggaran belanja, yang menjadi prioritas, seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bantuan dari dunia usaha.³¹ Dalam kondisi gejala krisis yang dialami oleh ekonomi nasional ini dapat dilakukan pemulihan memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat berlangsung secara cepat, yaitu dengan perkiraan tahun sekitar 4 sampai dengan 5 tahun (Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, 2020)

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Kerangka konseptual dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kinerja manajerial

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis data secara numerik, secara obyektif untuk menggambarkan, memprediksi atau mengontrol variabel yang menarik. Penelitian kuantitatif dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. (Sugiyono, 2018)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Kota Palopo yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, Tompotik a,kec. Wara,Kota Palopo,Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan dari bulan April sampai Juli 2022

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka populasi pada penelitian ini yaitu seluruh laporan keuangan pemerintah Kota Palopo.

Sampel

Dalam penelitian ini, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan berupa Laporan realisasi anggaran

Pemerintah Kota Palopo selama 4 Tahun yaitu tahun 2018-2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), data kuantitatif yaitu data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

Sumber data yang akan menjadi analisis dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Laporan keuangan pemerintah Kota Palopo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen yaitu dengan mengambil file laporan keuangan BPKAD tahun 2018-2021 dan profil kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palopo. Selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

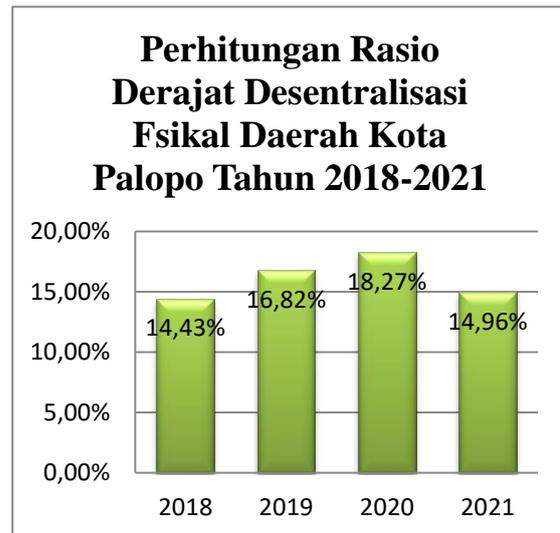
pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.



Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Palopo tingkat kemandiriannya mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020, hal ini bisa dilihat dari rasio kemandirian tahun 2018 sebesar 18,64% menjadi 22,79% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada 2020 sebesar 26,62 menjadi 18,17 pada tahun 2021. Namun jika hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka kemandirian Kota Palopo masih berada pada kondisi rendah atau masih berpola instruktif meskipun pada tahun 2020 mengalami konsultif. Artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mau nantinya dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk pembangunan.



Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal terlihat bahwa perkembangan rata-rata Pemerintah Kota Palopo mengalami kenaikan selama tiga tahun yaitu sebelum adanya covid-19 Tahun 2018 sebesar 14,43% menjadi 16,82% pada tahun 2019, setelah adanya covi-19 Tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 18,27% Lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 14,96%. Maka dari itu perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Palopo rata-rata masih berada pada kondisi kurang selama 4 tahun terakhir.

Rasio efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah.



Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas sebelum adanya pandemi Covid-19 rasio efektivitas PAD terjadi peningkatan sebesar 89,22% pada tahun 2018 menjadi 97,745 pada tahun 2019 dan setelah adanya Covid-19 pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 102,20% sehingga hal ini tergolong dalam efektifitas dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 91,06%. Dari rata-rata efektivitas sebesar 95,6% pada tahun 2018-2021 tergolong Cukup efektif.

Rasio efisiensi keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima



Berdasarkan perhitungan rasio dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan pemerintah daerah Kota Palopo sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 dan setelah adanya dampak pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018,2019,2020,2021 tergolong kurang efisien. Dimana pada tahun 2018 rasio sebesar 101,88% hal ini menunjukkan tidak efisien, namun pada tahun 2019 rasio menjadi 97,15% lalu pada tahun berikutnya 2020 menjadi 97,36 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,88% yang menjadi efisiensi keuangan daerah Kota Palopo rata-rata mengalami kurang efisien.

Pembahasan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Palopo mengalami kenaikan selama dua tahun, dan mengalami penurunan selama satu tahun terakhir. Namun jika hasil rasio

kemandirian dibandingkan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 dan setelah adanya Covid-19, maka kemandirian Kota Palopo masih berada pada kondisi rendah atau masih berpola instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

Jadi kemandirian keuangan Kota Palopo secara keseluruhan masih dikatakan rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan PAD yang didapatkan oleh Kota Palopo masih sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah Kota Palopo.

Rasio Derajat desentralisasi Fiskal Daerah Kota Palopo

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal terlihat bahwa perkembangan rata-rata pemerintah Kota Palopo yang terlihat pada gambaran rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan selama tiga tahun, dan mengalami penurunan selama satu tahun

terakhir. Maka dari itu perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Palopo rata-rata masih berada beberapa pada kondisi kurang selama 4 tahun terakhir.

Pada kondisi ini derajat desentralisasi fiskal pada Kota Palopo secara langsung pendapatan asli daerah yang masih kecil, yang dari sisi pemerintah, seharusnya lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Inovasi dan kreativitas daerah sangat diperlukan dalam kondisi pandemi saat ini sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian daerah Kota Palopo.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Palopo efektivitas PAD terjadi peningkatan selama tiga tahun sehingga hal ini tergolong dalam efektivitas dan mengalami penurunan selama satu tahun terakhir sehingga tergolong tidak efektif.

Hasil perhitungan pada rasio efektivitas kinerja keuangan berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kota Palopo sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir cukup efektif dan setelah adanya dampak Covid-19 selama satu tahun rasio

efektivitas PAD Kota Palopo dapat dikatakan sangat efektif dan kembali turun atau cukup efektif selama satu tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tergolong sangat Baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kota Palopo setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan walaupun tidak sesuai target anggaran yang sudah diperkirakan.

Total belanja daerah Kota Palopo mengalami penurunan tiap tahunnya berawal dari sebelum adanya pandemi Covid-19, selama dua tahun terakhir mengalami penurunan dan setelah adanya pandemi Covid-19 dua tahun terakhir mengalami penurunan kembali.

Berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Palopo sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi covid-19 dapat dikatakan kurang efisien. Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini masih perlu untuk meningkatkan jumlah belanja daerahnya.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dilihat dari empat rasio yang menunjang untuk menilai kinerja keuangan serta mengetahui tingkat kemandirian, derajat desentralisasi fiskal keefektifan, efisiensi periode 2018 - 2021 melalui lima rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemerintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Palopo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah, sehingga termasuk kedalam pola instruktif yakni peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.
2. Kinerja keuangan pemerintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Palopo berada pada kategori kurang dan masih perlu berbagai inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan desentralisasi daerah.

3. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Efektivitas pemerintah Kota Palopo dalam mengelola PAD belum baik dan dikategorikan tidak efektif.

4. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palopo kurang efisien dalam mengelola pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

1. Pemerintah Kota Palopo diharapkan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dengan melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Palopo juga harus tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat, agar kedepannya tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Pemerintah Kota Palopo sebaiknya lebih mengurangi proposional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. *Manajemen Dan Akuntansi*, 169. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/jibaku/index>

Aeni, S. N. (2020). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019*. 151–156.

Anita Wulandari. (2017). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.” *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah*, 5(2), 22. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabeta.

Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,12(1),11–15.

- <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Bastian Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit: Andi Offse t. 2507(February), 1–9.
- Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. 2016–2020.
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1),122–147.
<https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Mahsun, M. (2017). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta. 109.
- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. *Manajemen Dan Akuntansi*, 169.
<http://jurnal.unw.ac.id/index.php/jibaku/index>
- Aeni, S. N. (2020). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan PemeNrintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019*. 151–156.
- Anita Wulandari. (2017). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.” *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah*, 5(2), 22.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Bastian Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit: Andi Offse t. 2507(February), 1–9.
- Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. 2016–2020.
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan

- Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1),122–147.
<https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Mahsun, M. (2017). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta. 109.
- Mohamad Mahsun. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.130.
<https://doi.org/10.24912/jmk.v3i2.11893>
- Natasha. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora*.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Saftiana, Y., & Susantih, H. (2019). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Bagian Selatan*. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*. 84(2019), 487–492.
- Siswati, A. (2021). Dampak pandemi covid-19 pada kinerja keuangan sStudi kasus pada perusahaan teknologi yang listing di BEI). *Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 64–73.
- Sugiyono, M. (2018). (2018). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 22–34.